



HIJAU DIKENDALIKAN

**Bisnis-Bisnis Penghambat Transisi
Energi di Sekitar **Prabowo-Gibran****





Seri #ClimateCorruption
Indonesia Corruption Watch
2025

Hijau Dikendalikan: Bisnis-bisnis Penghambat Transisi Energi di Sekitar Prabowo–Gibran

Egi Primayogha
Seira Tamara
Yassar Aulia

Indonesia Corruption Watch
Jakarta, 2025
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6, Jakarta Selatan, 12740, Indonesia
www.antikorupsi.org

Ringkasan Utama

Laporan ini mengungkap keterkaitan antara aktor-aktor elite di sekitar Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan bisnis penghambat transisi energi yang berkeadilan, khususnya sektor mineral kritis dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Temuan menunjukkan bahwa proses transisi energi Indonesia berpotensi dibajak oleh kepentingan sempit elite politik dan bisnis, sehingga mengancam tercapainya target *Net Zero Emission (NZE)* secara adil dan berkelanjutan.

Melalui penelusuran terhadap data terbuka selama Oktober 2024 – Mei 2025, laporan ini menemukan bahwa sejumlah elite politik, pejabat publik, dan pengusaha terafiliasi dengan bisnis-bisnis transisi energi. Keterlibatan mereka membuka ruang praktik *state capture*, yaitu saat kebijakan publik dikendalikan untuk keuntungan kelompok tertentu, bukan kepentingan umum.

Laporan ini mendorong penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan terhadap aktor publik yang memiliki keterkaitan dengan bisnis energi. Selain itu, dorongan untuk mempercepat transisi energi harus dibarengi dengan prinsip keadilan, keterlibatan publik, dan perlindungan terhadap lingkungan dan warga terdampak.

Akronim dan Singkatan

AS	Amerika Serikat
ATR	Agraria dan Tata Ruang
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPN	Badan Pertanahan Nasional
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FATF	<i>Financial Action Task Force</i>
HGU	Hak Guna Usaha
ICW	Indonesia Corruption Watch
IUP	Izin Usaha Pertambangan
JETP	Just Energy Transition Partnership
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
NZE	<i>Net Zero Emission</i>
PEPs	Politically Exposed Persons
Perpres	Peraturan Presiden
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PP	Peraturan Pemerintah
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RUPTL	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
TKN	Tim Kampanye Nasional
UU	Undang-Undang
WIUP	Wilayah izin Usaha Pertambangan

Daftar Isi

Transisi Energi: Siapa yang Diuntungkan?	1
Korupsi dan Transisi Energi yang Berkeadilan	5
Menambang dari Kekuasaan: Bisnis Mineral Kritis di Sekitar Prabowo–Gibran	10
Pensiun Dini Energi Fosil: Terhambat oleh Kepentingan Tersembunyi?	20
Menjaga Transisi Energi dari Jerat Korupsi	27

Transisi Energi: Siapa yang Diuntungkan?

Indonesia telah menyatakan komitmen terhadap transisi energi. Sejumlah inisiatif serta kebijakan telah dikeluarkan guna menunjukkan komitmen tersebut. Pada tahun 2060 atau lebih cepat, Indonesia menyatakan akan mencapai *Net Zero Emission* atau emisi nol bersih (NZE). Pada tahun 2060, bauran energi terbarukan ditargetkan mencapai 70-72%.¹ Presiden RI Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan bahkan menyatakan akan menghentikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara pada tahun 2040.²

Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112/2022 untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan dan pensiun dini PLTU. Selain itu terdapat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 10/2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan. Dengan komitmen-komitmen tersebut, transisi energi diharapkan akan terlaksana di Indonesia. Dukungan internasional juga telah didapat melalui skema pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diharapkan akan mempermudah proses transisi energi.

Namun demikian, ada keraguan Indonesia tidak akan mencapai target tersebut tepat waktu. Ini lantaran ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang masih tinggi³ dan realisasi pendanaan yang jauh dari

¹ Bisnis.com, "Kebijakan Energi Nasional: Target Bauran Energi 23% Tercapai 2030", <https://hijau.bisnis.com/read/20250204/652/1836732/kebijakan-energi-nasional-target-bauran-energi-23-tercapai-2030#:~:text=Salah%20satu%20poin%20menarik%20dalam,tercatat%20baru%2013%2C9%25>, 4 Februari 2025.

² Kumparan.com, "Prabowo Targetkan RI Bebas Emisi 2050, Sinyal Positif Kebut Transisi Energi", <https://kumparan.com/kumparanbisnis/prabowo-targetkan-ri-bebas-emisi-2050-sinyal-positif-kebut-transisi-energi-23y8uOXuZiY>, 23 November 2024

³ IDNTimes, "Ketergantungan Indonesia terhadap Batu Bara Masih Tinggi", <https://www.idntimes.com/business/economy/triyan-pangastuti/ketergantungan-indonesia-terhadap-batu-bara-masih-tinggi?page=all>, 20 November 2024

target.⁴ Sampai dengan tahun 2023, tenaga listrik di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil. Dari total 91.164 MW kapasitas tenaga listrik, 54,58% merupakan PLTU Batubara.⁵ Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang dikeluarkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih mengakomodir 24% energi fosil. Tidak kalah penting, pendanaan JETP juga masih jauh dari sasaran awal US\$ 20 Miliar.⁶

Selain faktor-faktor di atas, transisi energi dapat terhambat oleh praktik korupsi. Praktik korupsi di sini dapat diartikan sebagai tindak pidana, dan pembajakan oleh elite politik, birokrasi, dan bisnis. Ini lantaran komitmen transisi energi membuka ruang-ruang baru yang bisa memberi manfaat ekonomi dan politik. Contohnya, proyek-proyek infrastruktur energi terbarukan, pendanaan untuk pensiun dini PLTU, bisnis mineral kritis, dan lain sebagainya.

Para elite dapat memperlambat proses transisi energi, dan pada waktu bersamaan ikut memanfaatkannya. Dalam konteks ini, pensiun dini PLTU dan bisnis mineral kritis penting untuk dibahas lebih jauh. Dua elemen tersebut menjadi krusial lantaran dapat menentukan seberapa cepat transisi energi yang berkeadilan dilakukan. Para elite karenanya dapat mencoba mendapat manfaat dengan mempengaruhi kebijakan pensiun dini PLTU maupun mineral kritis.

Dekarbonisasi ketenagalistrikan melalui pensiun dini PLTU krusial dalam upaya transisi energi lantaran PLTU batubara adalah salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar. Pensiun dini PLTU akan membantu menurunkan target emisi yang telah Indonesia canangkan. Akan tetapi, kendati telah terdapat ketentuan mengenai pelaksanaannya, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh para elite. Perpres nomor 112/2022 masih membolehkan pembangunan PLTU baru hingga tahun 2050. PLTU baru untuk industri (*captive*) juga diperbolehkan guna kepentingan hilirisasi sumber daya alam dan proyek strategis nasional.

Para elite yang hendak mendapatkan manfaat akan berupaya memastikan kebijakan tersebut tidak berubah, atau memengaruhi agar ada kebijakan lain yang sejenis. Dengan memastikan pensiun dini berjalan lambat, maka

⁴ Betahita.id, "Setahun Dana Transisi Energi Masih Jauh dari Berkeadilan: Kritik", <https://betahita.id/news/detail/10778/setahun-dana-transisi-energi-masih-jauh-dari-berkeadilan-kritik.html?v=1733969131>, 12 Desember 2024

⁵ Kementerian ESDM, Statistik Ketenagalistrikan 2023, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e6394-buku-statistik-ketenagalistrikan-2023-esdm-revised.pdf, Oktober 2024

⁶ Tempo.co, "Keliru: Klaim Hashim Djojohadikusumo bahwa JETP Program Gagal karena Tidak Ada Pembiayaan ke Indonesia", <https://www.tempo.co/cekfakta/keliru-klaim-hashim-djojohadikusumo-bahwa-jetp-program-gagal-karena-tidak-ada-pembiayaan-ke-indonesia-1204148>, 7 Februari 2025

bisnis energi fosil yang terhubung dengan mereka tidak terganggu. Mereka juga dapat melakukan lobi-lobi untuk mendapat jatah proyek hilirisasi sumber daya alam dan proyek strategis nasional.

Para elite selain itu bisa mendapatkan manfaat melalui bisnis mineral kritis. Mineral kritis merupakan elemen krusial dalam transisi energi, sehingga rentan dijadikan sasaran kelompok-kelompok yang bermaksud mendapatkan manfaat. Mineral kritis digunakan untuk berbagai teknologi energi terbarukan, mencakup turbin angin, panel surya, baterai untuk kendaraan listrik, baterai penyimpanan energi, hingga jaringan listrik. Ilustrasinya, panel surya menggunakan aluminum, nikel, tembaga, seng, dan timah. Turbin angin menggunakan nikel, tembaga, aluminum, kromium, besi, dan seng. Baterai membutuhkan nikel, timah, grafit, besi, kobalt, dan lithium.

Namun, mineral kritis dapat menghambat transisi energi yang berkeadilan. Praktik pertambangan mineral kritis kerap memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Selain itu, jika bisnis mineral kritis hanya difokuskan untuk memenuhi bisnis kendaraan listrik, maka transisi energi dapat kehilangan arah dan tujuan, melupakan aspek lain dari transisi energi seperti dekarbonisasi ketenagalistrikan.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan sumber daya mineral kritis yang melimpah. Antara tahun 2020 dan 2023, produksi tambang nikel Indonesia meningkat dari 34% ke 52%, dan nikel olahan meningkat dari 23% ke 37%.⁷ Indonesia juga menyumbang 49% produksi nikel global. Dalam hal timah, pada tahun 2020 Indonesia merupakan pemilik cadangan timah terbesar di dunia dengan 17% dari cadangan global. Selain nikel dan timah, Indonesia memiliki mineral kritis utama lain seperti logam tanah jarang, bauksit, dan tembaga.⁸

Berangkat dari alasan-alasan di atas, Indonesia Corruption Watch (ICW) menelusuri hubungan bisnis-bisnis yang berpotensi menghambat transisi energi yang berkeadilan dengan aktor dalam lingkaran Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Perlu dicatat bahwa para elite dapat mempermudah upaya mempengaruhi kebijakan transisi energi melalui akses kekuasaan. Itu dapat dilakukan dengan menduduki jabatan publik secara langsung, atau merawat kedekatan dengan aktor yang tengah berkuasa. Lingkaran Prabowo–Gibran dipilih lantaran telah terdapat berbagai ragam laporan

⁷ International Energy Agency, *Global Criticals Mineral Outlook 2024*, May 2024

⁸ CNBCIndonesia.com, "Cadangan Mineral Melimpah, Indonesia Jadi Pemain Kunci di Dunia", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240814174732-16-563101/cadangan-mineral-melimpah-indonesia-jadi-pemain-kunci-di-dunia>, 15 Agustus 2024

yang menunjukkan bahwa bisnis sumber daya alam kerap terhubung dengan kekuasaan.⁹

Penelusuran kali ini bermaksud melihat hubungan serupa namun berfokus pada proses transisi energi. Hubungan positif antar keduanya dapat berujung pada pengendalian proses transisi energi guna memberikan keuntungan bagi diri dan kelompok para elite. Penelusuran ini lantas bermaksud untuk memetakan potensi konflik kepentingan dalam bisnis transisi energi, untuk sekaligus menunjukkan kerentanannya akan praktik korupsi.

Penelusuran dilakukan dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Mei 2025. Selama kurun waktu tersebut, kami melakukan penelusuran data sekunder untuk melihat hubungan antara keduanya. Hasil penelusuran menemukan hubungan positif antara bisnis mineral kritis dan bisnis pembangkit bertenaga fosil dengan elite-elite di sekitar Prabowo–Gibran. Laporan singkat ini pertama-tama akan memberikan argumentasi pentingnya melihat praktik korupsi dalam transisi energi, lalu dilanjutkan dengan pemaparan hasil temuan dalam bisnis mineral kritis dan PLTU, dan ditutup dengan kesimpulan.

⁹ Project Multatuli, “Jejaring Pengusaha Tambang hingga Media di Lingkaran TKN Prabowo-Gibran”, 8 Februari 2024

Korupsi dan Transisi Energi yang Berkeadilan

Transisi energi mengharuskan pelaksanaannya berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Koalisi masyarakat sipil #BersihkanIndonesia menyebutkan bahwa transisi ke energi terbarukan mesti berjalan beriringan dengan “prinsip berkeadilan, berkedaulatan, transparan, akuntabel, berintegritas/antikorupsi, mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi manusia maupun non-manusia, menghormati keluhuran adat/tradisi budaya lokal, dan meningkatkan ketahanan penghidupan masyarakat serta mendukung upaya penanggulangan krisis iklim.”¹⁰

Dalam praktiknya, bisnis transisi energi dapat terancam oleh praktik korupsi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip di atas. Dari aspek pertambangan, yang lekat dengan bisnis mineral kritis, ICW mencatat setidaknya terdapat 23 kasus korupsi pertambangan selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Dari kasus-kasus tersebut, aparat penegak hukum menetapkan 74 orang tersangka. Negara bahkan merugi hingga Rp 12,59 triliun, dilengkapi nilai suap sebesar Rp 104,3 miliar.

Salah satu kasus yang ditangani adalah korupsi pertambangan ore nikel yang melibatkan aktor dari Kementerian ESDM. Kasus berkenaan dengan Wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam di Blok Mandiodo. Para aktor yang terjerat adalah mantan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Minerba Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Sugeng Mujiyanto, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin. Terdapat juga aktor lain yaitu General Manager PT Antam Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara, Hendra Wijayanto.

Di samping kasus-kasus pada kurun waktu tersebut, terdapat juga kasus korupsi pertambangan nikel yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi

¹⁰ #BersihkanIndonesia, Nilai & Prinsip Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan di Indonesia, <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Nilai%20dan%20Prinsip%20Transisi%20Energi%20yang%20Adil%20dan%20Berkelanjutan.pdf>, 21 Oktober 2022.

Tenggara, Nur Alam. Kasus tersebut merugikan negara hingga Rp 4,32 triliun dan berkenaan dengan gratifikasi yang diberikan pada Nur Alam sebesar Rp 22 miliar. Ia lalu dihukum 15 tahun penjara.

Selain itu, ada kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah di WIUP PT Timah tahun 2015-2022. Kasus ini berkaitan dengan persekongkolan sejumlah pihak untuk menampung hasil pertambangan timah ilegal. Akibat kasus ini, negara ditaksir merugi hingga Rp 271 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah individu dari berbagai latar belakang ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa di antaranya adalah pengusaha Harvey Moeis dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022, Bambang Gatot Ariyono.

Setali tiga uang, bisnis PLTU juga rentan akan praktik korupsi. Kasus korupsi PLTU antara lain dapat ditemukan dalam korupsi PLTU Riau-1. Dalam kasus tersebut, dua politisi Partai Golkar yang menduduki jabatan menteri dan anggota DPR menerima suap dari aktor bisnis. Mereka adalah Eni Saragih, anggota DPR RI, dan Idrus Marham, Menteri Sosial RI. Eni dan Idrus menerima suap hingga Rp 4,7 miliar dari Johannes Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Selain itu, terdapat kasus PLTU Cirebon yang melibatkan aktor eksekutif dan bisnis. Aktor tersebut yaitu Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan General Manager Hyundai Engineering & Construction, Herry Jung. Herry diduga memberikan suap hingga Rp 6,04 miliar guna memuluskan jalan mendapatkan proyek PLTU Cirebon. Kasus korupsi juga terjadi dalam *retrofit* sistem soot blowing atau penggantian komponen suku cadang di PLTU Bukit Asam PT PLN Persero Sumatera Bagian Selatan. Dalam kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua mantan manager PLN dan satu pebisnis sebagai tersangka.¹¹

Dalam ranah energi dan sumber daya alam, korupsi tidak hanya terjadi dalam bentuk tindak pidana. Praktik korupsi juga terjadi dalam bentuk *state capture*, yaitu jenis korupsi sistematis yang terjadi saat aktor-aktor tertentu mengambil kendali atas institusi dan proses pengambilan kebijakan.¹² Perlu dicatat bahwa sasaran dari *state capture* adalah pembentukan dan implementasi hukum atau kebijakan, serta institusi akuntabilitas. Institusi itu misalnya aparat penegak hukum, media, dan

¹¹ Detik, "KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi PLTU di Sumsel", <https://news.detik.com/berita/d-7431083/kpk-tahan-3-tersangka-dugaan-korupsi-pltu-di-sumsel>, 9 Juli 2024

¹² Elizabeth Dávid-Barrett, *State Capture And Development: A Conceptual Framework*, Journal of International Relations and Development, 2023

masyarakat sipil.¹³ Upaya mempengaruhi kebijakan, serangan terhadap kebebasan pers, dan serangan pada kebebasan sipil yang ter orkestrasi oleh sebab itu juga dapat dikategorikan sebagai *state capture*.

State capture dalam konteks energi dan sumber daya alam termanifestasikan antara lain ketika bisnis ekstraktif dari hulu ke hilir dikendalikan oleh segelintir orang, yang kerap terhubung dengan politisi atau pejabat publik. Dengan pengendalian itu, upaya mempengaruhi kebijakan dapat lebih mudah dilakukan. Konsekuensi dari praktik tersebut misalnya penerimaan negara dari bisnis ekstraktif menjadi rendah atau bahkan hilang. Lebih buruk, kerusakan lingkungan dan dampak negatif terhadap warga akibat bisnis mineral kritis dan pembangkit bertenaga fosil dapat terjadi.

Dalam konteks di atas, ide mengenai *Politically Exposed Persons* (PEPs) dapat disandingkan. PEPs dapat menjadi aktor kunci dalam melakukan praktik *state capture*. Financial Action Task Force (FATF) mengartikan PEPs sebagai individu yang sedang atau pernah menduduki jabatan publik, dan karena kedudukan serta pengaruhnya berpotensi melakukan pencucian uang, korupsi, suap, atau pendanaan terorisme.¹⁴ FATF mengkategorisasi PEPs sebagaimana berikut:¹⁵

1. PEP asing (*Foreign PEPs*): individu yang menjalankan fungsi publik oleh negara asing, contohnya: kepala negara/pemerintahan, pejabat tinggi pemerintah, politisi senior, pejabat BUMN, pejabat partai politik, dan kehakiman atau militer.
2. PEP domestik (*Domestic PEPs*): individu yang menjalankan fungsi publik di dalam negeri, tetapi diangkat oleh otoritas dalam negeri.
3. PEP organisasi internasional (*International Organisation PEPs*): individu yang menjalankan fungsi penting di organisasi internasional, mencakup direktur, wakil direktur, atau anggota dewan/manajemen yang setara.
4. Anggota keluarga: individu yang memiliki hubungan darah langsung (dapat berupa pasangan, anak, saudara kandung) atau hubungan karena pernikahan/sipil dengan seorang PEP.
5. Rekan dekat (*close associates*): individu yang memiliki hubungan sosial atau profesional yang erat dengan seorang PEP.

¹³ Ibid

¹⁴ Financial Action Task Force (FATF), *FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)*, <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf.coredownload.pdf>, June 2013

¹⁵ Ibid

Indonesia telah memiliki regulasi yang memberikan pemaknaan mengenai PEPs. Keberadaan regulasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mengakui potensi korupsi yang dilakukan oleh PEPs. Produk hukum tersebut yaitu Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) nomor 11/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*. Selain itu terdapat juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

Banyak peristiwa yang menunjukkan bisnis mineral kritis dan PLTU memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup dan kehidupan warga, yang memperkuat fakta bahwa bisnis-bisnis tersebut jauh bertentangan dengan prinsip transisi energi yang berkeadilan. Contohnya, di Desa Marombo Pantai, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, mata pencaharian warga terganggu akibat operasi pertambangan nikel yang berkembang pesat. Polusi dan lingkungan di sekitar ikut terkena dampak.¹⁶ Hal serupa terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang mana pertambangan nikel merusak sumber mata air warga hingga memicu banjir.¹⁷ Di Sagea, Weda Utara, Halmahera Tengah, Maluku Utara, aktivitas pertambangan dan hilirisasi nikel mencemari sungai dan laut, serta berkontribusi terhadap deforestasi.¹⁸

Dalam bisnis PLTU, pengoperasian PLTU Pacitan dan PLTU Paiton di Jawa Timur, serta PLTU Cilacap di Jawa Tengah berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan di daerah tersebut. Dampak tersebut dirasakan perlahan dan berpotensi terjadi dalam jangka panjang.¹⁹ Serupa dengan itu, PLTU di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan memberi dampak negatif bagi kesehatan, mata pencaharian warga, dan lingkungan. Operasi PLTU tersebut mencemarkan laut Punagaya dengan logam berat dari material batubara.²⁰

¹⁶ Mongabay, "Derita Manusia Perahu di Marombo Pantai Ketika Tambang Nikel Cemari Laut", <https://www.mongabay.co.id/2018/06/07/derita-manusia-perahu-di-marombo-pantai-ketika-tambang-nikel-cemari-laut/>, 7 Juni 2018

¹⁷ Tempo.co, "Vale Indonesia: Pencemaran Sungai Tambang Nikel Bisa dari Perusahaan Lain", <https://www.tempo.co/investigasi/vale-indonesia-tambang-nikel-kolaka-1219821>, 13 Maret 2025

¹⁸ Mongabay, "Lingkungan Halmahera Tengah Terus Tergerus Industri Nikel", <https://www.mongabay.co.id/2024/09/17/lingkungan-halmahera-tengah-terus-tergerus-industri-nikel/>, 17 September 2024

¹⁹ WALHI, Melihat Ulang Dampak PLTU di Tiga Wilayah (PLTU Paiton, PLTU Pacitan, PLTU Cilacap), Juni 2023

²⁰ Mongabay, "Riset WALHI Sulsel Ungkap Dampak Buruk PLTU Jeneponto untuk Warga dan Lingkungan", <https://mongabay.co.id/2023/08/03/riset-walhi-sulsel-ungkap-dampak-buruk-pltu-janeponto-untuk-warga-dan-lingkungan/>, 3 Agustus 2023

Praktik korupsi dapat memperpanjang dampak buruk di atas. Oleh sebab itu korupsi dapat menghambat upaya transisi energi yang berkeadilan. Bagian berikutnya akan mengilustrasikan bagaimana potensi konflik kepentingan, yaitu hubungan para elite di sekitar Prabowo–Gibran dengan bisnis transisi energi dapat membuka ruang bagi praktik korupsi dan bertentangan dengan prinsip transisi energi yang berkeadilan.

Menambang dari Kekuasaan: Bisnis Mineral Kritis di Sekitar Prabowo–Gibran

Sejumlah nama di lingkaran Prabowo–Gibran diduga terhubung dengan bisnis mineral kritis. Ini meliputi pejabat publik seperti menteri, wakil menteri, atau yang setingkat. Temuan juga menunjukkan terdapat politisi yang bukan merupakan pejabat publik, serta individu dari latar belakang lain namun terhubung dengan bisnis mineral kritis.

Penelusuran menemukan bahwa bisnis-bisnis mineral kritis terhubung dengan bisnis keluarga Djojohadikusumo, yang mana Presiden Prabowo Subianto merupakan bagiannya. Sejumlah nama yang terhubung antara lain Hashim Djojohadikusumo, Thomas A.M. Djiwandono, dan Aryo Puspito Setiaki Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo merupakan adik kandung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Prabowo mengangkatnya sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk bidang Iklim dan Energi. Hashim terafiliasi dengan grup perusahaan Arsari yang salah satu fokus bisnisnya adalah pertambangan. PT Arsari Tambang, bagian dari Arsari Group terhubung dengan bisnis timah. Bisnisnya mencakup aktivitas eksplorasi, eksploitasi, penambangan, pemrosesan, peleburan, pemurnian, penjualan, dan ekspor timah di wilayah kepulauan Bangka Belitung.

Hashim pernah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes tahun 2018. Dengan kekayaan 850 juta dolar AS, ia berada pada urutan ke-35.²¹ Ia diketahui pernah terlilit hutang pajak hingga Rp 2,4 triliun. Mahkamah Agung Federal Swiss pada 3 September 2024 memutuskan agar otoritas di Jenewa menyita rekening bank yang dimiliki oleh Hashim.²²

²¹ CNBCIndonesia.com, "Jejak Hashim Djojohadikusumo, Pengusaha Besar Adik Prabowo", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240902070744-17-568248/jejak-hashim-djojohadikusumo-pengusaha-besar-adik-prabowo>, 2 September 2024

²² Tempo, "Terlilit Utang Pajak Rp 2,4 triliun rekening Hashim Djojohadikusumo terancam disita otoritas swiss", <https://www.tempo.co/ekonomi/terlilit-utang-pajak-rp-2-4-triliun-rekening-hashim-djojohadikusumo-terancam-disita-otoritas-swiss-338>, 9 Oktober 2024

Bersama Prabowo, nama Hashim tercantum dalam *offshore database* yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran atau penghindaran pajak. Prabowo tersangkut skandal Paradise Papers, terkoneksi dengan perusahaan Nusantara Energy Resources yang terdaftar di Hamilton, Bermuda.²³ Sementara Hashim terhubung dengan perusahaan bernama Dora Capital Pte. Ltd yang terdaftar di Singapura.²⁴

Nama lain dari keluarga Djojohadikusumo yaitu Thomas A.M Djiwandono. Dia adalah anak dari Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, kakak kandung Prabowo Subianto. Thomas adalah Wakil Menteri Keuangan RI dan terafiliasi dengan anak-anak perusahaan PT Arsari Tambang seperti PT Aega Prima, PT Mitra Stania Prima, dan PT Mitra Stania Kemingking, yang masing-masing perusahaan tersebut menjabat sebagai Komisaris Utama²⁵. Selain itu, Thomas juga terafiliasi dengan PT Comexindo International, perusahaan pengembang perdagangan seperti batu bara, produk bijih besi, dan baja.²⁶ Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaan Thomas Djiwandono per 2023 mencapai Rp 73,6 miliar.²⁷

Selain itu, keluarga Djojohadikusumo terhubung dengan bisnis mineral kritis melalui Aryo Puspito Setiaki Djojohadikusumo, anak dari Hashim Djojohadikusumo. Aryo merupakan politisi Partai Gerindra dan pernah menjabat sebagai anggota DPR tahun 2014-2019. Kini ia adalah Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia.²⁸ Serupa dengan Thomas, Aryo terafiliasi dengan anak-anak perusahaan PT Arsari Tambang seperti PT Aega Prima dia, PT Mitra Stania Prima, dan PT Mitra Stania Kemingking, yang masing-masing perusahaan tersebut menjabat sebagai Direktur Utama²⁹.

²³ Project Multatuli, *loc.cit.*

²⁴ International Consortium of Investigative Journalists, "Hashim Djojohadikusumo", <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/123004>

²⁵ CNBC, "Bangun pabrik baru ini bisnis timah adik prabowo hashim", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240513171825-4-537722/bangun-pabrik-baru-ini-bisnis-tambang-timah-adik-prabowo-hashim>, 13 Mei 2024

²⁶ Tempo, "7 Fakta Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Dirumorkan Sebagai Pengganti Sri Mulyani", <https://www.tempo.co/politik/7-fakta-thomas-djiwandono-keponakan-prabowo-yang-dirumorkan-sebagai-pengganti-sri-mulyani--51887>, 6 Juni 2024

²⁷ Bisnis.com, "Harta Kekayaan Thomas Djiwandono Rp73 Miliar, Nol Utang", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250122/9/1833938/harta-kekayaan-thomas-djiwandono-rp73-miliar-nol-utang>, 22 Januari 2025

²⁸ Detik.com, "Daftar Lengkap Pengurus Kadin, Ada Keponakan Prabowo", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7824200/daftar-lengkap-pengurus-kadin-ada-keponakan-prabowo#:~:text=Adapun%20putra%20Hashim%2C%20Aryo%20Djojohadikusumo,Energi%20dan%20Sumber%20Daya%20Mineral>, 15 Maret 2025

²⁹ Ibid

Per Mei 2024, Aryo terafiliasi dengan PT Solder Tin Andalan Indonesia sebagai Komisaris. LHKPN tahun 2019 Aryo menunjukkan harta kekayaannya sebesar Rp 117,14 miliar.³⁰ Pada April 2025, Arsari Group akan membangun fasilitas berkuda di Ibukota Negara Nusantara (IKN) dan Aryo hadir mewakili Arsari Group dalam penyampaian rencana tersebut.³¹

Selain keluarga Djojohadikusumo, keluarga Thohir yang berada di lingkaran Prabowo–Gibran terhubung dengan bisnis mineral kritis. Mereka antara lain Erick Thohir dan Garibaldi “Boy” Thohir. Erick Thohir adalah Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih yang terafiliasi dengan Adaro Group. Adaro Group merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Grup perusahaan tersebut juga menjalankan bisnis aluminum dan nikel.

Hingga Mei 2024, Erick merupakan pemilik saham pada PT Trinugraha Thohir sebesar 23,33%³², Perusahaan tersebut memiliki saham di PT Adaro Energy Tbk dan memiliki anak perusahaan PT Adaro Minerals Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang smelter aluminium³³. Selain itu PT Adaro juga melakukan akuisisi saham³⁴ untuk memperluas komoditas nikel melalui PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) sebesar 3,7%. Adapun PT Adaro Energy Tbk telah merubah namanya menjadi PT AlamTri Resources Indonesia Tbk.³⁵ Erick di samping itu terhubung dengan PT Merdeka Battery Materials Tbk, perusahaan bahan baku baterai kendaraan listrik.³⁶

³⁰ Tempo, “Gurita Bisnis Aryo Djojohadikusumo, Keponakan Prabowo yang jadi Waketum ESDM Kadin”, <https://www.tempo.co/ekonomi/gurita-bisnis-aryo-djojohadikusumo-keponakan-prabowo-yang-jadi-waketum-esdm-kadin--1220990>, 18 Maret 2025

³¹ Kompas.com, “IKN Makin Lengkap, Aryo Djojohadikusumo Akan Bangun Equestrian”, <https://ikn.kompas.com/read/2025/04/12/095620087/ikn-makin-lengkap-aryo-djojohadikusumo-akan-bangun-equestrian>, 12 April 2025

³² Lihat Laporan PT Mahaka, https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202405/81d6967c3d_581d7a8b94.pdf, 2 Mei 2024,

³³ Lihat laporan Adaro Minerals, hlm 2, https://www.adarominerals.id/app/webroot/upload/files/Annual%20Report_PT%20Adaro%20Minerals%20Indonesia%20Tbk_2023%287%29.pdf

³⁴ CNBC, “Ini Deretan Bos Batubara yang Mulai Main Nikel”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220718001622-17-356295/ini-deretan-bos-batubara-yang-mulai-main-nikel#:~:text=PT%20Adaro%20Energy%20Indonesia%20Tbk>, 18 Juli 2022,

³⁵ Tempo, “Adaro Energy Milik Boy Thohir Ubah Nama Jadi PT AlamTri Resources Indonesia Tbk”, <https://www.tempo.co/ekonomi/adaro-energy-milik-boy-thohir-ubah-nama-jadi-pt-alamtri-resources-indonesia-tbk--1171335>, 21 November 2024

³⁶ Bisnis.com, “Gurita Bisnis dan Harta Kekayaan 7 Konglomerat yang Ikut Lawatan Presiden Prabowo ke China”, <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20241110/265/1814773/gurita-bisnis-dan-harta-kekayaan-7-konglomerat-yang-ikut-lawatan-presiden-prabowo-ke-china>, 10 November 2024

LHKPN yang dilaporkan Erick pada Maret 2024 menunjukkan kekayaannya sebesar Rp2,31 triliun.³⁷

Boy Thohir adalah kakak dari Erick Thohir, dan secara terbuka mendukung Prabowo Subianto dalam pilpres 2024. Pada saat pilpres, ia mengklaim beberapa orang terkaya di Indonesia akan memenangkan Prabowo Subianto.³⁸ Seperti adiknya, Boy terhubung dengan bisnis mineral kritis melalui Adaro Group yang telah berubah menjadi AlamTri Group. Boy adalah pemegang saham mayoritas di grup perusahaan tersebut, sekaligus merupakan Presiden Direktur PT AlamTri Resources Indonesia Tbk.³⁹ *Forbes* mengungkapkan total kekayaan Boy Thohir tahun 2024 mencapai Rp61,3 triliun.⁴⁰

Nama lain yang ditemukan adalah Andi Syamsuddin Arsyad atau biasa dipanggil Haji Isam. Haji Isam adalah pebisnis pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 dan dekat dengan mantan Presiden RI Joko Widodo, ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.⁴¹ Pasca Prabowo dilantik, Haji Isam berkali-kali terlihat bersama dengan Prabowo. Prabowo bahkan memperkenalkannya kepada para investor dan pengusaha Jepang di Istana Negara.⁴² Saat Prabowo menggelar pertemuan dengan para pengusaha besar, Haji Isam termasuk di antaranya. Ia ada bersama Anthony Salim, Sugianto Kusuma (Aguan), Anindya Bakrie, Boy Thohir, James Riady, Chairul Tanjung, Hilmi Panigoro, Tomy Winata, Prajogo Pangestu, Franky Oesman Widjaja.⁴³

³⁷ Tempo, "Harta Erick Thohir yang Rangkap Jabatan jadi Menteri BUMN dan Ketua Dewas Danantara", <https://www.tempo.co/ekonomi/harta-erick-thohir-yang-rangkap-jabatan-jadi-menteri-bumn-dan-ketua-dewas-danantara--1211783>, 25 Februari 2025

³⁸ Tempo, "Boy Thohir Sebut Beberapa Taipan Dukung Prabowo-Gibran, Berapa Nilai Kekayaan Mereka?", <https://www.tempo.co/data/data/boy-thohir-sebut-beberapa-taipan-dukung-prabowo-gibran-berapa-nilai-kekayaan-mereka--991938>, 26 Januari 2024

³⁹ AlamTri, *Board of Directors*, <https://www.alamtri.com/pages/read/8/27/Direksi>

⁴⁰ Bisnis.com, "Mengintip Kekayaan Garibaldi Thohir, Tak Masuk dalam Daftar Real Time Miliarder Forbes", <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20250107/265/1829561/mengintip-kekayaan-garibaldi-thohir-tak-masuk-dalam-daftar-real-time-miliarder-forbes>, 7 Januari 2025

⁴¹ Bisnis.com, "Sosok Haji Isam: Pemilik Jhonlin (JARR), Orang Dekat Jokowi", <https://kabar24.bisnis.com/read/20220714/16/1554921/sosok-haji-isam-pemilik-jhonlin-jarr-orang-dekat-jokowi>, 14 Juli 2022

⁴² Kompas.com, "Kenalkan Haji Isam ke Pengusaha Jepang, Prabowo: Pengusaha Terkemuka dari Kalimantan", <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/06/15204491/kenalkan-haji-isam-ke-pengusaha-jepang-prabowo-pengusaha-terkemuka-dari>, 6 Desember 2024

⁴³ Kompas.com, "Prabowo Kembali Terima Konglomerat di Istana, Ada Haji Isam hingga Chairul Tanjung", <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/07/14355661/prabowo-kembali-terima-konglomerat-di-istana-ada-haji-isam-hingga-chairul>, 7 Maret 2025

Haji Isam terafiliasi dengan Jhonlin Group, grup perusahaan yang memiliki bisnis smelter nikel dengan nilai investasi Rp 6,3 triliun.⁴⁴ Grup perusahaan tersebut juga memiliki bisnis pertambangan batubara, minyak sawit, pengolahan karet, bongkar-muat di laut lepas, dan persewaan jet pribadi.⁴⁵ Jhonlin Group sempat terseret dalam dugaan manipulasi batubara Adani Group yang berasal dari India. Dugaan itu diungkap oleh The Financial Times (FT) dan Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP), yang menyingkap skema pengiriman batubara berkualitas ke Adani Group berharga murah oleh PT Jhonlin.⁴⁶

Laporan Tempo menyebutkan terdapat sedikitnya empat menteri di Kabinet Merah Putih yang terafiliasi dengan Haji Isam. Mereka adalah Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.⁴⁷ Adapun Andi Amran Sulaiman merupakan sepupu Haji Isam.⁴⁸ Terdapat juga wakil menteri yang terafiliasi dengan Haji Isam, yaitu Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, yang menikah dengan adik Haji Isam.⁴⁹ Dalam kasus korupsi eks pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji⁵⁰, Haji Isam disebut oleh salah seorang saksi berperan mengatur nilai pajak PT Jhonlin Baratama.⁵¹

Andi Amran merupakan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) pada pemilu 2024. Dia merupakan pendiri Tiran Group, perusahaan yang

⁴⁴ Kompas.com, "Bangun Smelter Nikel Pertama di Kalimantan, Haji Isam Siapkan Rp 6,3 Triliun", <https://money.kompas.com/read/2021/12/20/113900926/bangun-smelter-nikel-pertama-di-kalimantan-haji-isam-siapkan-rp-6-3-triliun>, 20 Desember 2021

⁴⁵ Tempo, "Profil dan Bisnis Haji Isam yang Turut Dampingi Prabowo Bertemu Delegasi Jepang", <https://www.tempo.co/ekonomi/profil-dan-bisnis-haji-isam-yang-turut-dampingi-prabowo-ber-temu-delegasi-jepang-1178569>, 8 Desember 2024

⁴⁶ Tempo, "Sosok Haji Isam yang Diduga Terseret Kasus Adani Group", <https://www.tempo.co/hukum/sosok-haji-isam-yang-diduga-terseret-kasus-adani-group-53311>, 2 Juni 2024

⁴⁷ Tempo, "4 Orang Dekatnya Jadi Menteri Prabowo, Siapakah Haji Isam?", <https://www.tempo.co/ekonomi/4-orang-dekatnya-jadi-menteri-prabowo-siapakah-haji-isam--1144160>, 24 Oktober 2024

⁴⁸ Tempo, "Jejak Amran Sulaiman, Sepupu Haji Isam yang jadi Mentan Lagi Gantikan Syahrul Yasin Limpo", <https://www.tempo.co/ekonomi/jejak-amran-sulaiman-sepupu-haji-isam-yang-jadi-mentan-lagi-gantikan-syahrul-yasin-limpo-128634>, 25 Oktober 2023

⁴⁹ CNBC, "Sepupu hingga Mantan Anak Buah Haji Isam Masuk Kabinet Prabowo", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241020221335-17-581494/sepupu-hingga-mantan-anak-buah-haji-isam-masuk-kabinet-prabowo>, 21 Oktober 2024

⁵⁰ Bisnis.com, "Selain Bos Bank Panin, Konglomerat Haji Isam Juga Disebut di Kasus Suap Pajak", <https://kabar24.bisnis.com/read/20211004/16/1450313/selain-bos-bank-panin-konglomerat-haji-isam-juga-disebut-di-kasus-suap-pajak>, 4 Oktober 2021

⁵¹ Kompas.com, "Haji Isam Laporkan Saksi di Sidang Perkara Pajak ke Bareskrim Polri", <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/14495751/haji-isam-laporkan-saksi-di-sidang-perkara-pajak-ke-bareskrim-polri?page=all>, 7 Oktober 2021

menjalankan bisnis pertambangan nikel.⁵² PT Tiran Indonesia, bagian dari Tiran Group, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Andi, memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel seluas 1.411,35 hektar di Kabupaten Konawe Utara. IUP tersebut bernomor 155/2013 dan berlaku sejak 30 Juli 2013 hingga 30 Juli 2033.⁵³

Dudy Purwagandhi pernah berperan sebagai direktur PT Jhonlin Air Transport pada tahun 2008-2009, perusahaan transportasi yang tergabung dengan Jhonlin Group. Pada tahun 2009-2011, Dudy berperan sebagai Direktur PT Jhonlin Marine Trans, perusahaan transportasi kargo batu bara dan bijih besi.⁵⁴

Selain mereka, terdapat nama Bahlil Lahadalia yang menjabat Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih. Ia juga merupakan Ketua Partai Golkar dan berlatar belakang sebagai pebisnis. Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa Bahlil terhubung dengan PT Bersama Papua Unggul dan PT Rifa Capital, induk perusahaan PT Meta Mineral Pradana yang menjalankan bisnis pertambangan nikel.⁵⁵

Saat menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di era Presiden Joko Widodo, ia diduga mempolitikasi hak guna usaha (HGU) dan IUP. Ia yang berposisi sebagai Ketua Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi mencabut lebih dari 2000 izin tambang dan HGU dan berdalih pencabutan dikarenakan karena konsesi perusahaan tidak produktif. Bahlil diduga meminta fee kepada para pengusaha terkait izin tambang hingga Rp 25 miliar.⁵⁶ Ia juga pernah tersangkut dugaan pelanggaran etik disertasi di Universitas Indonesia.⁵⁷

Rosan Roeslani, Ketua TKN Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024 turut terhubung dengan bisnis mineral kritis. Ia menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabinet Merah Putih menggantikan Bahlil. Rosan terhubung dengan bisnis

⁵² Tiran Group, Profil, <https://tirangroup.com/profil/>

⁵³ Lihat Modi, <https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/7625?jp=1>,

⁵⁴ Liputan6.com, Daftar 11 Pengusaha yang Masuk Kabinet Merah Putih Prabowo, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5755795/daftar-11-pengusaha-yang-masuk-kabinet-merah-putih-prabowo?page=8>, 22 Oktober 2024.

⁵⁵ Jatam, “Korupsi Politik di Balik Gurita Bisnis Menteri Bahlil”, <https://jatam.org/id/lengkap/korupsi-politik-di-balik-gurita-bisnis-menteri-bahlil>, 18 Maret 2024

⁵⁶ Tempo, “Diduga Minta Fee Rp 25 Miliar, Ini Peran Bahlil di Izin Tambang”, <https://www.tempo.co/arsip/diduga-minta-fee-rp-25-miliar-ini-peran-bahlil-di-izin-tambang-80103>, 7 Maret 2024

⁵⁷ Kompas, “Mengapa Ada Petisi kepada UI: Pecat Bahlil dan Batalkan Disertasinya?”, <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-ada-petisi-kepada-ui-pecat-bahlil-dan-batalkan-disertasinya>, 15 Maret 2025

mineral kritis melalui PT Bumi Resources Tbk, perusahaan yang tergabung dalam Bumi Group, dan dirinya pernah menjadi komisaris. Ia mengundurkan diri sebagai komisaris Bumi Resources pada tahun 2021 setelah ditunjuk Joko Widodo sebagai duta besar RI untuk Amerika Serikat.⁵⁸

Bumi Group menjalankan bisnis pertambangan, pengolahan tembaga, dan seng salah satunya melalui PT Bumi Resources Minerals Tbk. Grup perusahaan tersebut terhubung dengan keluarga Bakrie. Nama-nama yang merupakan bagian dari keluarga tersebut antara lain Aburizal Bakrie, Anindya Bakrie, dan Adika Nuraga Bakrie. Aburizal merupakan pebisnis merangkap politisi yang mendukung Prabowo–Gibran dalam Pilpres 2024. Ia merupakan Dewan Pembina TKN Prabowo–Gibran. Aburizal pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus korupsi KTP elektronik.⁵⁹

Aburizal memiliki anak dan keponakan antara lain Anindya Bakrie dan Adika Nuraga Bakrie. Anindya kini menjabat sebagai Ketua Umum Kadin. Anindya pernah secara terbuka mengatakan potensi Indonesia dalam bisnis mineral kritis dan akan mengandalkannya dalam transisi energi.⁶⁰ Sementara Adika Nuraga Bakrie merupakan Direktur Utama PT Bumi Resources Tbk.

Nama lain yang ditemukan adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Widiyanti dilaporkan sebagai menteri terkaya di kabinet merah putih dengan kekayaan Rp 5,4 triliun.⁶¹ Ia terafiliasi dengan PT Indika Energy Tbk dan PT Teladan Resources, perusahaan batubara yang juga terhubung dengan bisnis perdagangan bijih nikel dan investasi pertambangan bauksit. PT Teladan memiliki saham 28% PT Indika.⁶² Bisnis mineral dijalankan oleh tiga anak perusahaan PT Indika, yaitu nikel oleh PT

⁵⁸ Bisnis.com, "Rosan Roeslani Mundur dari Kursi Komisaris Bumi Resources (BUMI)", <https://market.bisnis.com/read/20210825/192/1434008/rosan-roeslani-mundur-dari-kursi-komisaris-bumi-resources-bumi>, 25 Agustus 2021

⁵⁹ Kompas.com, "Aburizal Bakrie, Tamsil Linrung, dan Mulyadi Tak Bisa Penuhi Panggilan KPK", <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/02/16294701/aburizal-bakrie-tamsil-linrung-dan-mulyadi-tak-bisa-penuhi-panggilan-kpk>, 2 Juli 2018

⁶⁰ Viva, "Anindya Bakrie Sebut RI Bakal Andalkan Critical Mineral demi Pacu Transisi Energi", <https://www.viva.co.id/bisnis/1819778-anindya-bakrie-sebut-ri-bakal-andalkan-critical-mineral-demi-pacu-transisi-energi>, 2 Mei 2025

⁶¹ CNN Indonesia, "Profil Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Terkaya RI Berharta Rp5,4 T", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250122121054-92-1190117/profil-widiyanti-putri-wardhana-menteri-terkaya-ri-berharta-rp54-t>, 22 Januari 2025

⁶² Indika, 2024 Annual Report, <https://www.indikaenergy.co.id/wp-content/uploads/2025/04/2024-Annual-Report-Indika-Energy-1.pdf>, 2025

Rockgeo Energi Nusantara dan PT Perkasa Investama Mineral,⁶³ serta bauksit oleh PT Perkasa Investama Mineral (Mekko).⁶⁴

Widiyanti pernah menjabat Direktur Perusahaan PT Teladan Prima Agro Tbk sejak 2012-2021 dan Komisaris sejak 2021-2024. Pada rentang 2013-2024, ia menduduki jabatan komisaris di beberapa anak perusahaan PT Teladan.⁶⁵ Ayah dan Suami Widiyanti merupakan pengusaha, yaitu Wiwoho Basuki Tjokronegoro dan Wisnu Wardhana.⁶⁶

Lebih jauh, terdapat nama Sakti Wahyu Trenggono yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Merah Putih. Sakti pernah menduduki posisi komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk pada tahun 2018 hingga 2019.⁶⁷ Merdeka Copper Gold menjalankan bisnis tambang dan smelter nikel, antara lain di Sulawesi Tengah dan Tenggara.⁶⁸ Operasi bisnis tersebut dijalankan oleh PT Merdeka Battery Materials.⁶⁹ KPK pernah memanggil Sakti sebagai saksi dalam dugaan korupsi di PT Telkom.⁷⁰

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus juga terhubung dengan PT Merdeka Copper Gold. Lodewijk merupakan purnawirawan militer dan politisi Partai Golkar. Dalam pemilu 2024, dia merupakan Wakil Ketua TKN pemenangan Prabowo–Gibran.⁷¹ Laporan JATAM menunjukkan bahwa Lodewijk berposisi sebagai komisaris PT Puncak Emas Tani, perusahaan tambang emas di

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Indika, 2023 Annual Report,

<https://www.indikaenergy.co.id/wp-content/uploads/2024/04/2023-Annual-Report.pdf>, 2024

⁶⁵ Kumparan, "Profil Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata yang Punya Harta Rp 5,4 T", <https://kumparan.com/kumparannews/profil-widiyanti-putri-wardhana-menteri-pariwisata-yang-punya-harta-rp-5-4-t-24LpnjfmvGD/3>, 22 Januari 2025

⁶⁶ CNN Indonesia, "Profil Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Terkaya RI Berharta Rp5,4 T", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250122121054-92-1190117/profil-widiyanti-putri-wardhana-menteri-terkaya-ri-berharta-rp54-t>, 22 Januari 2025

⁶⁷ Laporan Tahunan Merdeka Copper Gold 2023, https://merdekacoppergold.com/wp-content/uploads/2024/05/MDKA_2024-04-30_Laporan-Tahunan-MDKA-2023-1.pdf, 2024

⁶⁸ CNBC Indonesia, "Merdeka Copper Siapkan 3 Proyek Raksasa, Dari Emas Hingga Nikel", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241217135633-4-596664/merdeka-copper-siapkan-3-proyek-raksasa-dari-emas-hingga-nikel>, 17 Desember 2024

⁶⁹ Merdeka Copper Gold, "Merdeka Battery Materials", <https://merdekacoppergold.com/bisnis-kami/merdeka-battery-minerals/>

⁷⁰ Kompas.com, "KPK Panggil Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sebagai Saksi", <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/12/12530321/kpk-panggil-menteri-kkp-sakti-wahyu-trenggono-sebagai-saksi>, 12 Juli 2025

⁷¹ Tempo, "Struktur Lengkap Tim Pemenangan Prabowo - Gibran, Ada Pengusaha, Politikus Hingga Jenderal",

<https://www.tempo.co/ekonomi/struktur-lengkap-tim-pemenangan-prabowo-gibran-ada-pengusaha-politikus-hingga-jenderal-123737>, 7 November 2023

Corontalo. 49% saham perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Puncak Emas Gorontalo, anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold.⁷²

Selain itu, terdapat nama Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Merah Putih Airlangga Hartarto. Airlangga terhubung dengan dua perusahaan yang mengoperasikan bisnis mineral kritis. Menurut laporan JATAM tahun 2024, dia merupakan pemilik saham mayoritas PT Sahabat Asia Indonesia, perusahaan yang memiliki saham dalam PT Graha Equity Investment. Dua perusahaan tersebut mengoperasikan bisnis tambang zirkon.⁷³ Airlangga pernah dipanggil sebagai saksi dalam dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah.⁷⁴

Nama lain yang terhubung dengan bisnis mineral kritis adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut terhubung dengan grup perusahaan PT TBS Energi Utama, atau dulu dikenal dengan PT Toba Bara Sejahtera. Selain bisnis batubara, grup perusahaan tersebut mengoperasikan bisnis kendaraan listrik yang bergantung dengan bahan baku mineral kritis.⁷⁵ Anggaran dasar perusahaan tersebut juga memasukkan pertambangan mineral kritis seperti bijih timah dan bijih nikel dalam bentuk kegiatan usaha, sehingga mereka berniat untuk mengembangkan bisnisnya ke ranah tersebut.⁷⁶

Luhut pernah dinyatakan oleh hakim persidangan kasus pencemaran nama baik sebagai penerima manfaat PT Toba Bara Sejahtera.⁷⁷ Perusahaan tersebut merupakan pemegang saham minoritas dengan besaran 8,93% saham di PT TBS Energi Utama.⁷⁸ Serupa dengan Luhut, Penasehat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro juga terhubung

⁷² Jaringan Advokasi Tambang, "Lodewijk Freidrich Paulus", <https://pemilu.jatam.org/tokoh.php?nama=lodewijkfreidrichpaulus>

⁷³ Jaringan Advokasi Tambang, "Airlangga Hartarto", <https://pemilu.jatam.org/tokoh.php?nama=airlanggahartanto>

⁷⁴ CNBC Indonesia, "Usai Diperiksa Kejagung 12 Jam, Airlangga Akhirnya Keluar", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230724183215-4-456900/usai-diperiksa-kejagung-12-jam-airlangga-akhirnya-keluar>, 24 Juli 2023

⁷⁵ Kontan, "TOBA Raih Pinjaman US\$ 15 Juta untuk Bisnis Kendaraan Listrik, Inilah Profil Usahanya", <https://insight.kontan.co.id/news/toba-raih-pinjaman-us-15-juta-untuk-bisnis-kendaraan-listrik-inilah-profil-usahanya>, 29 Desember 2024

⁷⁶ TBS Energi Utama, Annual Report 2023, https://assets-new.tbsenergi.com/annual-report-tbs-2023_TsjZ6OR-4.pdf

⁷⁷ Tempo, "Hakim Sidang Haris Azhar Sebut Luhut Miliki 99 Persen Saham di PT Toba Sejahtera", <https://www.tempo.co/hukum/hakim-sidang-haris-azhar-sebut-luhut-miliki-99-persen-saham-di-pt-toba-sejahtera--100124>, 8 Januari 2024

⁷⁸ TBS Energi Utama, *op.cit.*

dengan PT TBS Energi Utama. Bambang pernah menempati posisi komisaris PT TBS Energi Utama hingga Maret 2025.⁷⁹

Laporan investigasi DetikX menuturkan dugaan bahwa Luhut menekan Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto untuk segera menayangkan kendaraan listrik di situs E-Katalog. E-Katalog merupakan platform digital milik pemerintah yang menyediakan daftar produk dan jasa dari penyedia sah untuk keperluan pengadaan elektronik. Roni akhirnya mundur dan setelahnya kendaraan listrik ditayangkan dalam E-Katalog. PT TBS Energi Utama bersama PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) diketahui membentuk perusahaan gabungan bernama Electrum. Bisnis Electrum meliputi ekosistem kendaraan listrik seperti baterai, kendaraan listrik, dan stasiun penukaran baterai dan pengisian kendaraan listrik.⁸⁰

Bagian di atas telah mengurai keterkaitan bisnis mineral kritis dengan elite-elite di sekitar Prabowo–Gibran. Bagian berikutnya akan menunjukkan temuan hubungan bisnis PLTU di lingkaran Prabowo–Gibran.

⁷⁹ Tempo, "Bambang Brodjonegoro Mundur dari Komisaris TOBA", <https://www.tempo.co/ekonomi/bambang-brodjonegoro-mundur-dari-komisaris-toba-1217127>, 9 Maret 2025

⁸⁰ DetikX, "Pemain Bisnis Mobil Listrik di Lingkaran Jokowi", <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20221003/Pemain-Bisnis-Mobil-Listrik-di-Lingkaran-Jokowi/>, 3 Oktober 2022

Pensiun Dini Energi Fosil: Terhambat oleh Kepentingan Tersembunyi?

Serupa dengan bisnis mineral kritis, penelusuran menemukan berbagai nama di sekitar Prabowo–Gibran dalam bisnis PLTU. Mereka yang terhubung dengan bisnis pembangkit bertenaga fosil tersebut berposisi menteri, wakil menteri, dan jabatan-jabatan lainnya. Keterkaitan nama-nama berikut berpotensi menghambat upaya pengurangan emisi melalui dekarbonisasi ketenagalistrikan.

Penelusuran menemukan Setiawan Ichlas, atau kerap dipanggil Iwan Bomba, Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan perbankan. Ia merupakan pengusaha batubara dan pemilik Bomba Group, perusahaan yang ia dirikan pada tahun 2021. Bisnis utama Bomba Group meliputi Agroindustri, Energi, Logistik & Distribusi, serta Kontraktor & Jasa, dengan daerah operasional sebagian besar di Provinsi Sumatera Selatan.⁸¹ Melalui perusahaan ini, Iwan terafiliasi dengan PLTU Sumatera Selatan (Sumsel) 1 yang terletak di Tanjung Menang, Muara Enim. Bomba Group melalui PT Cakra Bumi Energi (CBE) membangun fasilitas listrik dan pembangkit listrik hulu tambang dan menyuplai batu bara sebagai material PLTU Sumsel 1.⁸²

Iwan pernah tersangkut sejumlah kasus, antara lain dugaan tindak pidana penggelapan oleh istri mantan menteri. Pada tahun 2022, Hanifah Husein, istri Ferry Mursyidan Baldan, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), diduga melakukan penggelapan terkait PT Batubara Lahat. Iwan saat itu dituding melakukan

⁸¹ Bomba Group, "Tentang Kami", <https://bombagrup.com/id/about>

⁸² Liputan 6, "Bangun Pabrik Pengolahan, Bomba Grup Pasok Batu Bara ke PLTU Sumsel 1", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5191255/bangun-pabrik-pengolahan-bomba-grup-pasok-batu-bara-ke-pltu-sumsel-1?page=4>, 27 Januari 2023

kriminalisasi terhadap Hanifah guna mengambil alih lahan untuk Bomba Group.⁸³

Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM ikut terhubung dengan bisnis PLTU. Ia merupakan Wakil Ketua TKN pada Pemilihan Presiden 2024.⁸⁴ Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, ia pernah menduduki posisi sebagai Chief Executive Officer (CEO) dari Bomba Group sejak tahun 2021 hingga tahun 2024.⁸⁵ Jabatan tersebut membuat dirinya turut terafiliasi dengan PLTU Sumsel-1, sebab Bomba Group diberitakan memasok batubara untuk PLTU Sumsel-1 yang juga merupakan proyek strategis nasional.⁸⁶

Nama lain yang ditemukan adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, Luhut terafiliasi dengan PT TBS Energi Utama. PT TBS Energi Utama pernah terafiliasi dengan setidaknya tiga PLTU, diantaranya PLTU Sulut-3, PLTU Sulbagut-1, dan PLTU Paiton. Dua anak perusahaan TBS merupakan perusahaan pengelola PLTU, yaitu PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) yang mengelola PLTU Sulbagut di Desa Tanjung Karang, Gorontalo, serta PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) yang mengelola PLTU Sulut-3 di Desa Kema I, Sulawesi Utara.⁸⁷

Meski demikian, pada November 2024, TBS melakukan divestasi dua aset PLTU tersebut.⁸⁸ TBS sebelumnya juga memiliki saham di PLTU Paiton Energi lewat anak perusahaan TBS yaitu PT Batu Hitam Perkasa. Pada tahun 2021, kepemilikan saham tersebut dilepas oleh TBS.⁸⁹ Bambang Brodjonegoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, ikut terhubung dengan bisnis-bisnis PLTU

⁸³ Tempo, "Sosok Iwan Bomba, Pengusaha Batu Bara yang jadi Utusan Khusus Prabowo", <https://www.tempo.co/ekonomi/sosok-iwan-bomba-pengusaha-batu-bara-yang-jadi-utusan-khusus-prabowo-1144187>, 24 Oktober 2024

⁸⁴ AntaraNews, "Todotua Pasaribu, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran/CEO Bomba Group", <https://www.antaranews.com/berita/4405457/todotua-pasaribu-wakil-ketua-tnk-prabowo-gibran-ceo-bomba-group>, 18 Oktober 2024

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Liputan 6, "Bangun Pabrik Pengolahan, Bomba Grup Pasok Batu Bara ke PLTU Sumsel 1", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5191255/bangun-pabrik-pengolahan-bomba-grup-pasok-batu-bara-ke-pltu-sumsel-1?page=4>, 27 Januari 2023

⁸⁷ Tempo, "Emiten Terafiliasi Luhut, TBS Energi Utama (TOBA) Divestasi 2 PLTU Senilai US\$ 144 Juta", <https://www.tempo.co/ekonomi/emiten-terafiliasi-luhut-tbs-energi-utama-toba-divestasi-2-pltu-senilai-us-144-juta-1169120>, 16 November 2024

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Bisnis.com, "TOBA Lepas Saham PLTU Paiton ke Medco (MEDC) Setara Rp998 Miliar", <https://market.bisnis.com/read/20210823/192/1433041/toba-lepas-saham-pltu-paiton-ke-medco-medc-setara-rp998-miliar>, 23 Agustus 2011

tersebut lantaran pernah menjadi Komisaris Independen PT TBS Energi Utama.

Selain Luhut dan Bambang, Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata juga terafiliasi dengan bisnis PLTU. Bagian sebelumnya telah menjelaskan keterkaitan Widiyanti dengan Teladan Group dan Indika Group. Indika Group tergabung dalam konsorsium multinasional bernama Cirebon Electric Power yang mengoperasikan PLTU Cirebon 1.⁹⁰ Konsorsium tersebut juga terlibat dalam pengoperasian PLTU Cirebon 2.⁹¹ Adapun setidaknya sejak tahun 2022 pemerintah telah memutuskan akan menyuntik mati PLTU Cirebon 1, namun hingga tahun 2025 belum ada langkah lebih jauh yang dilakukan.⁹²

Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum ikut terhubung dengan bisnis PLTU. Bagian sebelumnya telah memperlihatkan keterkaitannya dengan dengan Haji Isam beserta bisnisnya, Jhonlin Group. Salah satu anak usaha Jhonlin Group, yaitu Jhonlin Energi Kalimantan pernah menyatakan minat terhadap bisnis PLTU. Laporan Trend Asia pada Juni 2024 menyebutkan bahwa menurut data PLN, Jhonlin Energi Kalimantan merupakan salah satu peminat dalam pembangunan PLTU mulut tambang Kalimantan Selatan.⁹³ Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut mengenai progresnya. Afiliasi Dody dengan perusahaan milik Haji Isam membuatnya berpotensi terafiliasi dengan bisnis PLTU.

Serupa dengan Dody, Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar berpotensi terhubung dengan bisnis PLTU. Ini lantaran Dudy pernah menjadi Direktur PT Jhonlin Marine Trans dan PT Jhonlin Air Transport ikut berpotensi terhubung dengan bisnis PLTU. Sementara Sulaiman Umar, yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi VII DPR RI merupakan adik ipar dari Haji Isam.

Pejabat lain yang terhubung yaitu Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Melalui keterkaitannya dengan PT Berau Coal Energy (BRAU), ia terhubung dengan bisnis PLTU. Rosan pernah menjabat

⁹⁰ Bisnis.com, "PLTU Cirebon-1 Bakal Disuntik Mati, Proyek Indika Energy (INDY) dan Marubeni Cs, <https://market.bisnis.com/read/20221114/192/1597980/pltu-cirebon-1-bakal-disuntik-mati-proyek-indika-energy-indy-dan-marubeni-cs>, 14 November 2022

⁹¹ *Ibid*

⁹² CNBC Indonesia, "Pemerintah Pantang Mundur Pensiun Dini PLTU Cirebon, Bahlil Sebut Ini", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250421201334-4-627610/pemerintah-pantang-mundur-pensiun-dini-pltu-cirebon-bahlil-sebut-ini>, 21 April 2025

⁹³ Trend Asia, Penanggung Cuan Transisi Energi, Juni 2024, h.25.

Presiden Direktur PT Berau Coal Energy pada tahun 2010-2013,⁹⁴ dan grup perusahaan tersebut diketahui pernah memasok batubara gratis ke PLTU Lati.⁹⁵ Pada April 2017, Rosan diberitakan dalam penyidikan kasus penggelapan dan tindak pidana pencucian uang hasil penjualan saham PT Bank Eksekutif International Tbk. Rosan yang merupakan pemilik Recapital Group menjadi terlapor dalam kasus tersebut.⁹⁶

Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terhubung dengan bisnis PLTU melalui PT Barata Indonesia. Silmy pernah menjabat sebagai Direktur PT Barata Indonesia pada tahun Agustus 2016 sampai September 2018.⁹⁷ Dirinya juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT PAL (Persero) pada tahun 2011 hingga 2014.⁹⁸ Dua jabatan tersebut membuatnya terafiliasi dengan sejumlah PLTU. PT Barata Indonesia terlibat dalam proyek pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 dengan memasok komponen utama turbin uap.⁹⁹ Sedangkan PT PAL terafiliasi dengan PLTU Pelabuhan Ratu melalui pengiriman Proyek *Open Cycle Cooling Water Pump* (OCCWP).¹⁰⁰

Lebih jauh, Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara memiliki keterkaitan dengan bisnis PLTU lantaran pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga, meski tidak diketahui periode jabatannya.¹⁰¹ PT Pertamina Patra Niaga regional Jawa Barat terafiliasi dengan proyek pembangunan PLTU Suralaya. Keterkaitan tersebut muncul dari adanya kerjasama PT Pertamina Patra Niaga yang memasok BBM Solar non-subsidi B35 ke PLTU Suralaya melalui kerja sama dengan PT Indo Raya Tenaga.¹⁰²

⁹⁴ Dunia Energi, "Ini Bantahan Lengkap Rosan Roeslani Soal Tuduhan Bumi Plc", <https://www.dunia-energi.com/ini-bantahan-lengkap-rosan-soal-gajinya-pada-bumi-plc/>, 17 Juni 2013

⁹⁵ SindoNews, "Berau Coal Tambah Pasokan Batu Bara Gratis ke PLTU Lati", <https://ekbis.sindonews.com/berita/1408646/34/berau-coal-tambah-pasokan-batu-bara-gratis-ke-pltu-lati>, 30 Mei 2019

⁹⁶ CNN Indonesia, "Polri Mulai Sisik TPPU Saham Bank Eksekutif", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170406191410-12-205580/polri-mulai-sidik-tppu-saham-bank-eksekutif>, 6 April 2017.

⁹⁷ Kompas.com, "Profil Silmy Karim, Ahli Manajemen Pertahanan yang Jadi Dirjen Imigrasi", <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/27/07401781/profil-silmy-karim-ahli-manajemen-pertahanan-yang-jadi-dirjen-imigrasi>, 27 Juli 2022

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Kompas.com, "Barata Indonesia Pasok Komponen Turbin PLTU Jawa 9 dan 10", <https://money.kompas.com/read/2021/06/08/20200626/barata-indonesia-pasok-komponen-turbin-pltu-jawa-9-dan-10>, 8 Juni 2021

¹⁰⁰ PT PAL Indonesia, "PT PAL Indonesia (Persero) Load Out Proyek OCCWP PLTU Pelabuhan Ratu", <https://www.pal.co.id/pt-pal-indonesia-persero-load-out-proyek-occwp-pltu-pelabuhan-ratu/>

¹⁰¹ Viva, "Profil Juri Ardiantoro Calon Pejabat Pengganti Gubernur Anies Baswedan", <https://www.viva.co.id/berita/metro/1519993-profil-juri-ardiantoro-calon-pejabat-pengganti-gubernur-anies-baswedan?page=all>, 12 September 2022

¹⁰² Kumparan, "Pertamina Patra Niaga Pasok Solar B35 ke PLTU Suralaya, Banten",

Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Presiden Urusan Energi dalam Kabinet Merah Putih pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Bayan Resources Tbk (BYAN) sejak Januari 2018 hingga November 2024.¹⁰³ Melalui rekam jejak tersebut, ia terhubung dengan bisnis PLTU. Pada tahun 2023, BYAN bersama dengan anak usahanya PT Bayan Energy (BE) mengakuisisi seluruh saham PT Kariangau Power (KP).¹⁰⁴ KP sendiri mengoperasikan PLTU Kariangau Power yang dibangun oleh PT Gunung Bayan.¹⁰⁵ Pada Juni 2015, Purnomo sempat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri berkaitan dengan dugaan korupsi penjualan kondensat.¹⁰⁶

Keterkaitan mereka berpotensi menghambat dorongan pensiun dini PLTU. Terlebih aturan hukum mengenai hal tersebut membuka peluang agar dekarbonisasi ketenagalistrikan berjalan lambat. Perpres Nomor 112/2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik memuat sejumlah ketentuan yang dianggap bertentangan dengan dorongan transisi energi dan tujuan untuk mencapai NZE di tahun 2060 atau lebih cepat.

Pasal 3 angka 7 Perpres 112/2022 menyiratkan bahwa salah satu kriteria untuk percepatan pengakhiran operasional PLTU didasari adanya ketersediaan pendanaan dari dalam dan/atau luar negeri. Selain itu, aturan ini juga masih membuka ruang bagi PLTU untuk beroperasi sampai tahun 2050 di kawasan industri atau proyek strategis nasional. Serupa dengan itu, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10/2025 Tentang Peta Jalan Transisi Energi Ketenagalistrikan tidak menunjukkan komitmen yang cukup untuk segera beralih ke energi terbarukan. Peraturan tersebut memuat kriteria yang mempertimbangkan alasan teknis dan ekonomi, bukan urgensi lingkungan hidup.

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/pertamina-patra-niaga-pasok-solar-b35-ke-pltu-surabaya-banten-21vsagqKpt3>, 9 Januari 2024

¹⁰³ Warta Ekonomi, "Purnomo Yusgiantoro Mundur dari PT Bayan Resources, Fokus Jadi Penasihat

Presiden", <https://wartaekonomi.co.id/read548681/purnomo-yusgiantoro-mundur-dari-pt-bayan-resources-fokus-jadi-penasihat-presiden>, 6 November 2024

¹⁰⁴ IDN Financials, "BYAN akuisisi Kariangau Power guna optimalkan profitabilitas", <https://www.idnfinancials.com/archive/id/47301/byan-akuisisi-kariangau-power-guna-optimalkan-profitabilitas>, 3 Juli 2023

¹⁰⁵ Bisnis.com, "Bayan (BYAN) Akuisisi Kariangau Power Milik Orang Terkaya RI", <https://market.bisnis.com/read/20231204/192/1720677/bayan-byan-akuisisi-kariangau-power-milik-orang-terkaya-ri>, 4 Desember 2023

¹⁰⁶ Kompas, "Purnomo Yusgiantoro Sudah Diperiksa Polisi Terkait Korupsi Kondensat", <https://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/16001161/Purnomo.Yusgiantoro.Sudah.Diperiksa.Polisi.Terkait.Korupsi.Kondensat>, 18 Juni 2015

7 kriteria yang ditentukan berkaitan dengan pensiun dini PLTU meliputi kapasitas, usia pembangkit utilisasi, emisi gas rumah kaca PLTU, nilai tambah ekonomi, ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri, serta ketersediaan dukungan teknologi dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, peta jalan ini masih mengatur skema pemanfaatan energi ketenagalistrikan dari ekstraksi sumber daya alam seperti hutan dan gas bumi yang dampak eksternalitasnya tidak akan jauh berbeda dengan PLTU batubara.

Peraturan lainnya yang akan menghambat yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Peraturan ini adalah pembaharuan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Peraturan ini menuai banyak kritik sebab dipandang melemahkan komitmen terhadap energi terbarukan. Melalui RPP ini, target bauran energi terbarukan tahun 2030 dari yang semula 24% diturunkan menjadi 19-22%. Terlebih, RPP ini tidak mengakomodir ruang untuk pengembangan energi terbarukan skala komunitas menunjukkan bahwa PP KEN baru ini tidak mendukung transisi energi yang adil dan inklusif, terutama di wilayah 4T (tertinggal, terdepan, terluar, terpencil).¹⁰⁷

Kondisi di atas juga diperparah oleh keberadaan PLTU *captive*, atau PLTU untuk keperluan industri yang terhindar dari kebijakan pensiun dini PLTU. Perpres No. 112/2022 menempatkan PLTU *captive* sebagai pengecualian. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf b dalam Perpres tersebut masih membuka peluang untuk pembangunan PLTU *captive* baru. Sejak tahun 2014, pertumbuhan PLTU *captive* telah tumbuh hampir lima kali lipat dari 2,3 GW menjadi 11,2 GW di tahun 2023.¹⁰⁸ Peningkatan ini utamanya didorong oleh adanya ekspansi besar-besaran industri peleburan mineral di Maluku Utara dan Sulawesi.¹⁰⁹ PLTU *captive* juga dimanfaatkan untuk mendukung program hilirisasi mineral yang menghasilkan bahan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik yang kerap dianggap lebih ramah lingkungan.

Dengan kapasitas yang sudah terbilang masif, pembangunan PLTU *captive* saat ini masih akan bertambah hingga 20 GW dari total 26,8 GW PLTU baru yang dimuat pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060. Dengan jumlah yang masih akan terus bertambah, maka upaya

¹⁰⁷ Trend Asia, "Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional Penuh Solusi Palsu dan Tidak Mendorong Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan", <https://trendasia.org/peraturan-pemerintah-kebijakan-energi-nasional-penuh-solusi-palsu-dan-tidak-mendorong-transisi-energi-yang-adil-dan-berkelanjutan/>, 15 September 2024

¹⁰⁸ Ember Energy, Rencana Ekspansi PLTU *Captive* dapat Menghambat Target Iklim Indonesia, https://ember-energy.org/app/uploads/2025/02/ID-Indonesia-RUKN-2025_14022025.pdf, h.4

¹⁰⁹ *Ibid*

untuk melakukan transisi energi akan semakin terhambat. Hingga 2030 mendatang, emisi yang dihasilkan oleh PLTU *captive* diperkirakan dapat mencapai 400 Mt CO₂ atau setara dua kali lipat dari emisi yang seharusnya dipertahankan dalam komitmen iklim.¹¹⁰ Perlu dicatat bahwa bisnis-bisnis yang berhubungan dengan para elite di sekitar Prabowo–Gibran berpotensi menggunakan PLTU *captive*. Sehingga, PLTU *captive* berpotensi sulit tersentuh dari kebijakan pensiun dini. Akan tetapi, perlu ada penelusuran lebih jauh mengenai hal tersebut.

Bagian di atas telah menjelaskan keterkaitan para elite dengan bisnis PLTU, regulasi yang bertentangan dengan semangat transisi energi, hingga PLTU *captive* yang tidak tersentuh kebijakan pensiun dini PLTU. Bagian berikut akan memberikan simpulan dari penelusuran yang dilakukan.

¹¹⁰ Tirto.id, “Asap Hitam PLTU *Captive* Membayangi Mimpi Besar Transisi Energi” <https://tirto.id/asap-hitam-pltu-captive-membayangi-mimpi-besar-transisi-energi-g4Dz>, 14 Oktober 2024

Menjaga Transisi Energi dari Jerat Korupsi

Bagian di atas telah menguraikan bagaimana aktor-aktor di sekitar Prabowo–Gibran, meliputi elit bisnis, politisi, dan birokrasi memiliki keterkaitan erat dengan bisnis yang berpotensi menghambat transisi energi yang berkeadilan. Keterkaitan ini mengindikasikan potensi konflik kepentingan yang tinggi, sehingga membuka ruang terjadinya praktik *state capture* dalam proses transisi tersebut.

Temuan penelusuran ini sekaligus menunjukkan bahwa komitmen transisi energi Indonesia sangat rentan dipengaruhi oleh kepentingan privat para elite. Akibatnya, kebijakan yang semestinya mendorong percepatan transisi justru dapat membuka celah bagi keberlanjutan dan ekspansi bisnis energi fosil, lalu menghambat proses transisi itu sendiri.

Temuan-temuan juga menekankan pentingnya melihat korupsi tidak sebatas dari aspek legal-formal. Sejumlah praktik korupsi di sektor energi dan sumber daya alam telah diproses secara hukum, dan perlu terus dilanjutkan. Risiko korupsi dalam sektor tersebut membuat lembaga-lembaga seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan *Badan Pemeriksa Keuangan* (BPK) memperkuat pengawasan dan mengidentifikasi modus-modus baru kecurangan atau korupsi dalam transisi energi.

Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa praktik mempengaruhi kebijakan yang berpotensi dilakukan oleh para elite dapat berlangsung di luar batasan tindak pidana. Tindakan mempengaruhi kebijakan dapat dilakukan dalam ranah legal dan tidak selalu dapat diklasifikasikan sebagai korupsi dalam hukum positif di Indonesia.

Hubungan erat para elite di sekitar Prabowo–Gibran dengan bisnis transisi energi membawa pada pentingnya untuk memperkuat pengawasan terhadap konflik kepentingan. Perlu ada regulasi yang memadai untuk mencegah serta menangani permasalahan tersebut.

Hingga saat ini, baru terdapat satu regulasi yang memberikan panduan cukup rinci mengelola konflik kepentingan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17/2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Namun, pengaturan mengenai konflik kepentingan setingkat Undang-Undang (UU) dapat memberi kekuatan hukum yang lebih mengikat. Selain itu, peraturan setingkat UU akan memiliki daya ikat yang lebih kuat terhadap semua pejabat publik dan institusi negara. Tanpa dasar hukum setingkat UU, regulasi konflik kepentingan rentan diabaikan dan tidak ditegakkan secara konsisten di seluruh sektor.

Lebih jauh, perlu ada dorongan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana transisi energi seperti Just Energy Transition Partnership (JETP). Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan juga perlu dipastikan dalam penggunaannya. Tanpa ada kepastian terhadap prinsip-prinsip tersebut, dana JETP rentan diselewengkan oleh para elite yang memiliki kepentingan.

JETP dapat diarahkan pada proyek-proyek transisi yang hanya memberikan keuntungan bagi bisnis para elite sembari mengabaikan prinsip transisi energi berkeadilan. Konsekuensinya, JETP tidak akan memberi manfaat bagi warga terdampak kerusakan lingkungan, pencemaran, perampasan lahan, dan lain sebagainya.

Tidak kalah penting, untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan dan manfaat transisi energi di tangan segelintir elite, desentralisasi energi perlu menjadi salah satu prinsip utama dalam proses transisi. Desentralisasi tidak hanya bertujuan memperluas akses energi, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi publik, kepemilikan komunitas, dan pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Tanpa upaya ini, transisi energi berisiko mengulang pola lama industri ekstraktif yang dikendalikan oleh elite.

Temuan-temuan di atas membuka peluang untuk penelusuran lebih jauh mengenai beberapa hal, antara lain penggunaan PLTU *captive* oleh bisnis yang terafiliasi dengan elite di sekitar kekuasaan. Penggunaan PLTU *captive* yang sulit dikendalikan merupakan salah satu ancaman serius bagi upaya transisi energi. Oleh karena itu, penting untuk mengungkap potensi konflik kepentingan dalam bisnis tersebut guna mencegah pengaruh elite terhadap kebijakan terkait PLTU *captive*.

Lebih jauh, studi komparasi antara Indonesia dan negara lain dalam menghadapi risiko *state capture* dalam transisi energi perlu dilakukan agar

dapat mengidentifikasi pola umum, strategi mitigasi yang efektif, serta praktik-praktik kebijakan yang berhasil membatasi dominasi elite dalam proses transisi. Pembelajaran dari negara lain dapat memberi manfaat bagi Indonesia dalam merancang kebijakan transisi yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Buku / Jurnal

Dávid-Barrett, E. 2023. *“State capture and development: a conceptual framework”*. Journal of International Relations and Development.

Setyawan, Wahyu Eka, dkk. 2023. “Melihat Ulang Dampak PLTU di Tiga Wilayah (PLTU Paiton, PLTU Pacitan, PLTU Cilacap)”. Jawa Tengah: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Artikel Elektronik

AlamTri. "Board of Directors". Diakses melalui: <https://www.alamtri.com/pages/read/8/27/Direksi>.

Alexander, Hilda B. 2025. "IKN Makin Lengkap, Aryo Djojohadikusumo Akan Bangun Equestrian". Diakses melalui: <https://ikn.kompas.com/read/2025/04/12/095620087/ikn-makin-lengkap-aryo-djojohadikusumo-akan-bangun-equestrian>.

Al Hasan, Adil. 2024. "Adaro Energy Milik Boy Thohir Ubah Nama Jadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/ekonomi/adaro-energy-milik-boy-thohir-ubah-nama-jadi-pt-alamtri-resources-indonesia-tbk--1171335>.

Arfah, Hamzah, dan Bambang P Jatmiko. 2021. "Barata Indonesia Pasok komponen Turbin PLTU Jawa 9 dan 10". Diakses melalui: <https://money.kompas.com/read/2021/06/08/202000626/barata-indonesia-pasok-komponen-turbin-pltu-jawa-9-dan-10>.

Ayu, Dizki Dewi. 2024. "Diduga Minta Fee Rp25 Miliar, Ini Peran Bahlil di Izin Tambang". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/arsip/diduga-minta-fee-rp-25-miliar-ini-peran-bahlil-di-izin-tambang-80103>.

Ayuningrum, Retno. 2025. "Daftar Lengkap Pengurus Kadin, Ada Keponakan Prabowo". Diakses melalui: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7824200/daftar-lengkap-pengurus-kadin-ada-keponakan-prabowo#:~:text=Adapun%20putra%20Hashim%2C%20Aryo%20Djojohadikusumo,Energi%20dan%20Sumber%20Daya%20Mineral>.

Azzahra, Nabila. 2024. "Sosok Iwan Bomba, Pengusaha Batu Bara yang Jadi Utusan Khusus Prabowo". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/ekonomi/sosok-iwan-bomba-pengusaha-batu-bara-yang-jadi-utusan-khusus-prabowo-1144187>.

Azzahra, Qonita. 2024. "Asap Hitam PLTU Captive Membayangi Mimpi Besar Transisi Energi". Diakses melalui: <https://tirto.id/asap-hitam-pltu-captive-membayangi-mimpi-besar-transisi-energi-g4Dz>.

Bhawono, Aryo. "Setahun Dana Transisi Energi Masih Jauh dari Berkeadilan: Kritik". 2024. Diakses melalui: <https://betahita.id/news/detail/10778/setahun-dana-transisi-energi-masih-jauh-dari-berkeadilan-kritik.html?v=1733969131>.

Binekasri, Romys. 2024. "Jejak Hashim Djojohadikusumo, Pengusaha Besar Adik Prabowo". Diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240902070744-17-568248/jejak-hashim-djojohadikusumo-pengusaha-besar-adik-prabowo>.

Bomba Grup. "Tentang Kami". Diakses melalui: <https://bombagrup.com/id/about>.

Chairulia, Putri Atika. 2024. "Todotua Pasaribu, Wakil Ketua TKN Prabowo - Gibran/CEO Bomba Group". Diakses melalui: <https://www.antaranews.com/berita/4405457/todotua-pasaribu-wakil-ketua-tnk-prabowo-gibran-ceo-bomba-group>.

CNBC Indonesia. 2022. "Ini Deretan Bos Batubara yang Mulai 'Main' Nikel". Diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220718001622-17-356295/in-i-deretan-bos-batubara-yang-mulai-main-nikel#:~:text=PT%20%20Adaro%20Energy%20Indonesia%20%20Tbk>.

_____. 2024. "Sepupu hingga Mantan Anak Buah Haji Isam Masuk Kabinet Prabowo". Diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241020221335-17-581494/se-pupu-hingga-mantan-anak-buah-haji-isam-masuk-kabinet-prabowo>.

_____. 2023. "Usai Diperiksa Kejagung 12 Jam, Airlangga Akhirnya Keluar". Diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230724183215-4-456900/usai-diperiksa-kejaung-12-jam-airlangga-akhirnya-keluar>

CNN Indonesia. 2025. "Profil Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Terkaya RI Berharta Rp5,4 T". Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250122121054-92-1190117/profil-widiyanti-putri-wardhana-menteri-terkaya-ri-berharta-rp54-t>.

_____. 2017. "Polri Mulai Sidik TPPU Saham Bank Eksekutif". Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170406191410-12-205580/polri-mulai-sidik-tppu-saham-bank-eksekutif>.

- Chandra, Wahyu. 2023. "Riset WALHI Sulsel Ungkap Dampak Buruk PLTU Jeneponto untuk Warga dan Lingkungan". Diakses melalui: <https://mongabay.co.id/2023/08/03/riset-walhi-sulsel-ungkap-dampak-buruk-pltu-janeponto-untuk-warga-dan-lingkungan/>.
- Dirgantara, Adhastha, dan Ardito Ramadhan. 2025. "Prabowo Kembali Terima Konglomerat di Istana, Ada Haji Isam hingga Chairul Tanjung". Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/07/14355661/prabowo-kembali-terima-konglomerat-di-istana-ada-haji-isam-hingga-chairul>.
- Dyantoro, Sunu. 2025. "Vale Indonesia: Pencemaran Sungai Tambang Nikel Bisa dari Perusahaan Lain". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/investigasi/vale-indonesia-tambang-nikel-kolaka-1219821>.
- Dwi, Andika. 2023. "Jejak Amran Sulaiman, Sepupu Haji Isam yang Jadi Mentan Lagi Gantikan Syahrul Yasin Limpo". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/ekonomi/jejak-amran-sulaiman-sepupu-haji-isam-yang-jadi-mentan-lagi-gantikan-syahrul-yasin-limpo-128634>.
- _____. 2023. "Struktur Lengkap Tim Pemenangan Prabowo - Gibran, Ada Pengusaha, Politikus Hingga Jenderal". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/ekonomi/struktur-lengkap-tim-pemenangan-prabowo-gibran-ada-pengusaha-politikus-hingga-jenderal-123737>.
- Faizal, Mohammad. 2019. "Berau Coal Tambah Pasokan Batu Bara Gratis ke PLTU Lati". Diakses melalui: <https://ekbis.sindonews.com/berita/1408646/34/berau-coal-tambah-pasokan-batu-bara-gratis-ke-pltu-lati>.
- Farmita, Artika Rachmi. 2025. "Keliru: Klaim Hashim Djojohadikusumo bahwa JETP Program Gagal karena Tidak Ada Pembiayaan ke Indonesia". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/cekfakta/keliru-klaim-hashim-djojohadikusumo-bahwa-jetp-program-gagal-karena-tidak-ada-pembiayaan-ke-indonesia-1204148>.
- Gideon, Arthur. 2024. "Daftar 11 Pengusaha yang Masuk Kabinet Merah Putih Prabowo". Diakses melalui: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5755795/daftar-11-pengusaha-yang-masuk-kabinet-merah-putih-prabowo?page=8>.

- Cumilar, Pandu. 2021. "Rosan Roeslani Mundur dari Kursi Komisaris Bumi Resources (BUMi)". Diakses melalui: <https://market.bisnis.com/read/20210825/192/1434008/rosan-roeslani-mundur-dari-kursi-komisaris-bumi-resources-bumi>.
- Hafiyyan. 2021. "TOBA Lepas Saham PLTU Paiton ke Medco (MEDC) Setara Rp998 Miliar". Diakses melalui: <https://market.bisnis.com/read/20210823/192/1433041/toba-lepas-saha-m-pltu-paiton-ke-medco-medc-setara-rp998-miliar>.
- _____. 2023. "Bayan (BYAN) Akuisisi Kariangau Power Milik Orang Terkaya RI". Diakses melalui: <https://market.bisnis.com/read/20231204/192/1720677/bayan-byan-akuisisi-kariangau-power-milik-orang-terkaya-ri>.
- Halim, Fikri, dan Mohammad Yudha Prasetya. 2025. "Anindya Bakrie Sebut RI Bakal Andalkan Critical Mineral demi Pacu Transisi Energi". Diakses melalui: <https://www.viva.co.id/bisnis/1819778-anindya-bakrie-sebut-ri-bakal-andalkan-critical-mineral-demi-pacu-transisi-energi>.
- Harjanto, Setyo Aji. 2021. "Selain Bos Bank Panin, Konglomerat Haji Isam Juga disebut di Kasus Suap Pajak". Diakses melalui: <https://kabar24.bisnis.com/read/20211004/16/1450313/selain-bos-bank-panin-konglomerat-haji-isam-juga-disebut-di-kasus-suap-pajak>.
- Haswar, Andi Muhammad, dan Erlangga Djumena. 2021. "Bangun Smelter Nikel Pertama di Kalimantan, Haji Isam Siapkan Rp6,3 Triliun". Diakses melalui: <https://money.kompas.com/read/2021/12/20/113900926/bangun-smelter-nikel-pertama-di-kalimantan-haji-isam-siapkan-rp-6-3-triliun>.
- Hidayat, Amry Nur. 2024. "Purnomo Yusgiantoro Mundur dari PT Bayan Resources, Fokus Jadi Penasihat Presiden". Diakses melalui: <https://wartaekonomi.co.id/read548681/purnomo-yusgiantoro-mundur-dari-pt-bayan-resources-fokus-jadi-penasihat-presiden>.
- IDN Financials. 2023. "BYAN Akuisisi Kariangau Power Guna Optimalkan Profitabilitas". Diakses melalui: <https://www.idnfinancials.com/archive/id/47301/byan-akuisisi-kariangau-power-guna-optimalkan-profitabilitas>.

International Consortium of Investigative Journalists. "Hashim Djojohadikusumo". Diakses melalui: <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/123004>.

Islami, Zaki. 2022. "Profil Juri Ardiantoro Calon Pejabat Pengganti Gubernur Anies Baswedan". Diakses melalui: <https://www.viva.co.id/berita/metro/1519993-profil-juri-ardiantoro-calon-pejabat-pengganti-gubernur-anies-baswedan?page=all>.

Issetiabudi, David Eka. 2025. "Kebijakan Energi Nasional: Target Bauran Energi 23% Tercapai 2030". Diakses melalui: <https://hijau.bisnis.com/read/20250204/652/1836732/kebijakan-energi-nasional-target-bauran-energi-23-tercapai-2030#:~:text=Salah%20sat u%20poin%20menarik%20dalam,tercatat%20baru%2013%2C9%25>.

Izzudin, Hammam. 2024. "Emiten Terafiliasi Luhut, TBS Energi Utama (TOBA) Divestasi 2 PLTU Senilai US\$ 144 Juta". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/ekonomi/emiten-terafiliasi-luhut-tbs-energi-utama-toba-divestasi-2-pltu-senilai-us-144-juta-1169120>.

JATAM. 2024. "Korupsi Politik di Balik Gurita Bisnis Menteri Bahlil". Diakses melalui: <https://jatam.org/id/lengkap/korupsi-politik-di-balik-gurita-bisnis-menteri-bahlil>.

_____. "Lodewijk Freidrich Paulus". Diakses melalui: <https://pemilu.jatam.org/tokoh.php?nama=lodewijkfreidrichpaulus>

_____. "Airlangga Hartarto". Diakses melalui: <https://docs.google.com/document/d/1ImPx2mdyCwtHjDadB8lh8CBzLq9srOtYfdXUczJdz1c/edit?tab=t.0>.

Javier, Faisal. 2024. "Boy Thohir Sebut Beberapa Taipan Dukung Prabowo-Gibran, Beberapa Nilai Kekayaan Mereka?". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/data/data/boy-thohir-sebut-beberapa-taipan-dukung-prabowo-gibran-berapa-nilai-kekayaan-mereka-991938>.

Julian, Muhammad. 2024. "TOBA Raih Pinjaman US\$ 15 Juta untuk Bisnis Kendaraan Listrik, Inilah Profil Usahanya". Diakses melalui: <https://insight.kontan.co.id/news/toba-raih-pinjaman-us-15-juta-untuk-bisnis-kendaraan-listrik-inilah-profil-usahanya>.

- Kamarudin. 2018. "Derita Manusia Perahu di Marombo Pantai Ketika tambang Nikel Cemari Laut". Diakses melalui: <https://mongabay.co.id/2018/06/07/derita-manusia-perahu-di-marombo-pantai-ketika-tambang-nikel-cemari-laut/>.
- Kompas. 2018. "Aburizal Bakrie, Tamsil Linrung, dan Mulyadi tak Bisa Penuhi Panggilan KPK". Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/02/16294701/aburizal-bakrie-tamsil-linrung-dan-mulyadi-tak-bisa-penuhi-panggilan-kpk>.
- Kuwado, Fabian Januarius. 2015. "Purnomo Yusgiantoro Sudah Diperiksa Polisi Terkait Korupsi Kondensat". Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/16001161/Purnomo.Yusgiantoro.Sudah.Diperiksa.Polisi.Terkait.Korupsi.Kondensat>
- Kumparan Bisnis. 2024. "Prabowo Targetkan RI Bebas Emisi 2050, Sinyal Positif Kebut Transisi Energi". Diakses melalui: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/prabowo-targetkan-ri-bebas-emisi-2050-sinyal-positif-kebut-transisi-energi-23y8uOXuZiY>.
- _____. 2024. "Pertamina Patra Niaga Pasok Solar B35 ke PLTU Suralaya, Banten". Diakses melalui: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pertamina-patra-niaga-pasok-solar-b35-ke-pltu-suralaya-banten-21vsaggKpt3>.
- Liputan 6. 2023. "Bangun Pabrik Pengolahan, Bomba Grup Pasok Batu Bara ke PLTU Sumsel 1". Diakses melalui: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5191255/bangun-pabrik-pengolahan-bomba-grup-pasok-batu-bara-ke-pltu-sumsel-1?page=4>.
- _____. 2023. "Bangun Pabrik Pengolahan, Bomba Grup Pasok Batu Bara ke PLTU Sumsel 1". Diakses melalui: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5191255/bangun-pabrik-pengolahan-bomba-grup-pasok-batu-bara-ke-pltu-sumsel-1?page=4>.
- Luthfiani, Desty. 2024. "Hakim Sidang Haris Azhar Sebut Luhut Miliki 99 Persen Saham di PT Toba Sejahtera". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/hukum/hakim-sidang-haris-azhar-sebut-luhut-miliki-99-persen-saham-di-pt-toba-sejahtera--100124>.
- Maharani, Tsarina, dan Bayu Galih. 2021. "Haji Isam Laporkan Saksi di Sidang Perkara Pajak ke Bareskrim Polri". Diakses melalui:

<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/14495751/haji-isam-laporkan-saksi-di-sidang-perkara-pajak-ke-bareskrim-polri?page=all>.

Muliawati, Anggi. 2024. "KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi PLTU di Sumsel. Diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-7431083/kpk-tahan-3-tersangka-dugaan-korupsi-pltu-di-sumsel>.

Muliawati, Firda Dwi. 2024. "Bangun Pabrik Baru, Ini Bisnis Tambang Timah Adik Prabowo Hashim". Diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240513171825-4-537722/bangun-pabrik-baru-ini-bisnis-tambang-timah-adik-prabowo-hashim>.

Nabila, Mutiara. 2025. "Mengintip Kekayaan Garibaldi Thohir, Tak Masuk dalam Daftar Real Time Miliarder Forbes". Diakses melalui: <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20250107/265/1829561/mengintip-kekayaan-garibaldi-thohir-tak-masuk-dalam-daftar-real-time-miliarder-forbes>

Ningrum, Melinda Kusuma. 2024. "7 Fakta Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Dirumorkan Sebagai Pengganti Sri Mulyani". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/politik/7-fakta-thomas-djiwandono-keponakan-prabowo-yang-dirumorkan-sebagai-pengganti-sri-mulyani--51887>

PAL. 2020. "PT PAL Indonesia (Persero) Load Out Proyek OCCWP PLTU Pelabuhan Ratu". Diakses melalui: <https://www.pal.co.id/pt-pal-indonesia-persero-load-out-proyek-occwp-pltu-pelabuhan-ratu/>.

Pangastuti, Triyan. 2024. "Ketergantungan Indonesia terhadap Batu Bara Masih Tinggi". Diakses melalui: <https://www.idntimes.com/business/economy/triyan-pangastuti/ketergantungan-indonesia-terhadap-batu-bara-masih-tinggi?page=all>.

Pratama, Wibi Pangestu. 2025. "Harta Kekayaan Thomas Djiwandono Rp73 Miliar, Nol Utang". Diakses melalui: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250122/9/1833938/harta-kekayaan-tomas-djiwandono-rp73-miliar-nol-utang>.

Project Multatuli. 2024. "Jejaring Pengusaha Tambang hingga Media di Lingkaran TKN Prabowo-Gibran". Diakses melalui:

<https://projectmultatuli.org/jejaring-pengusaha-tambang-hingga-media-di-lingkarantkn-prabowo-gibran/>.

Puspita, Melynda Dwi. 2025. "Gurita Bisnis Aryo Djojohadikusumo, Keponakan Prabowo yang jadi Waketum ESDM Kadin". Diakses melalui:

<https://www.tempo.co/ekonomi/gurita-bisnis-aryo-djojohadikusumo-keponakan-prabowo-yang-jadi-waketum-esdm-kadin--1220990>.

Puspita, Melynda Dwi. 2025. "Harta Erick Thohir yang Rangkap Jabatan jadi Menteri BUMN dan Ketua Dewas Danantara". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/ekonomi/harta-erick-thohir-yang-rangkap-jabatan-jadi-menteri-bumn-dan-ketua-dewas-danantara--1211783>.

Putra, Han Revanda. 2024. "Terlilit Utang Pajak Rp2,4 Triliun, Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss". Diakses melalui:

<https://www.tempo.co/ekonomi/terlilit-utang-pajak-rp-2-4-triliun-rekening-hashim-djojohadikusumo-terancam-disita-otoritas-swiss-338>.

Rachmawati, Evy. 2025. "Mengapa Ada Petisi kepada UI: Pecat Bahlil dan Batalkan Disertasinya?". Diakses melalui: <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-ada-petisi-kepada-ui-pecat-bahlil-dan-batalkan-disertasinya>.

Rasdianto, Fajar Yusuf, dan Rani Rahayu. 2022. "Pemain Bisnis Mobil Listrik di Lingkaran Jokowi". Diakses melalui: <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20221003/Pemain-Bisnis-Mobil-Listrik-di-Lingkaran-Jokowi/>.

Ricardo, Edward. 2024. "Cadangan Mineral Melimpah, Indonesia Jadi Pemain Kunci di Dunia". Diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240814174732-16-563101/cadangan-mineral-melimpah-indonesia-jadi-pemain-kunci-di-dunia>

Saptohutomo, Aryo Putranto. 2022. "Profil Silmy Karim, Ahli Manajemen Pertahanan yang Jadi Dirjen Imigrasi". Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/27/07401781/profil-silmy-karim-ahli-manajemen-pertahanan-yang-jadi-dirjen-imigrasi>.

Saumi, Annisa Kurniasari, dan Setyo Aji Harjanto. 2022. "Sosok Haji Isam: Pemilik Jhonlin (JARR), Orang Dekat Jokowi". Diakses melalui:

<https://kabar24.bisnis.com/read/20220714/16/1554921/sosok-haji-isam-pemilik-jhonlin-jarr-orang-dekat-jokowi>.

Sawal, Rabul. 2024. "Lingkungan Halmahera Tengah Terus Tergerus Industri Nikel". Diakses melalui: <https://mongabay.co.id/2024/09/17/lingkungan-halmahera-tengah-terus-tergerus-industri-nikel/>.

Setiawan, Verda Nano. 2024. "Merdeka Copper Siapkan 3 Proyek Raksasa, Dari Emas Hingga Nikel". Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241217135633-4-596664/merdeka-copper-siapkan-3-proyek-raksasa-dari-emas-hingga-nikel>.

_____. 2025. "Pemerintah Pantang Mundur Pensiun Dini PLTU Cirebon, Bahlil Sebut Ini". Diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250421201334-4-627610/pemerintah-pantang-mundur-pensiun-dini-pltu-cirebon-bahlil-sebut-ini>.

Shabrina, Dinda. 2025. "Bambang Brodjonegoro Mundur dari Komisaris TOBA". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/ekonomi/bambang-brodjonegoro-mundur-dari-komisaris-toba-1217127>.

Sulistya, Ananda Ridho. 2024. "Profil dan Bisnis Haji Isam yang Turut Dampingi Prabowo Bertemu Delegasi Jepang". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/ekonomi/profil-dan-bisnis-haji-isam-yang-turut-dampingi-prabowo-bertemu-delegasi-jepang-1178569>

Sulistya, Ananda Ridho. 2024. "Sosok Haji Isam yang Diduga Terseret Kasus Adani Group". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/hukum/sosok-haji-isam-yang-diduga-terseret-kasus-adani-group-53311>.

_____. 2024. "4 Orang Dekatnya Jadi Menteri Prabowo, Siapakah Haji Isam?". Diakses melalui: <https://www.tempo.co/ekonomi/4-orang-dekatnya-jadi-menteri-prabowo-siapakah-haji-isam--1144160>.

Tantan, Hidayat. 2013. "Ini Bantahan Lengkap Rosan Roeslani Soal Tuduhan Bumi Plc". Diakses melalui:

<https://www.dunia-energi.com/ini-bantahan-lengkap-rosan-soal-gajiin-ya-pada-bumi-plc/>

Tonce, Dionisio Damara. 2024. "Gurita Bisnis dan Harta Kekayaan 7 Konglomerat yang Ikut Lawatan Presiden Prabowo ke China. Diakses melalui:

https://entrepreneur.bisnis.com/read/20241110/265/1814773/gurita-bisnis-dan-harta-kekayaan-7-konglomerat-yang-ikut-lawatan-presiden-prabowo-ke-china#goog_rewarded.

Trend Asia. 2024. "Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional Penuh Solusi Palsu dan Tidak Mendorong Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan". Diakses melalui:

<https://trendasia.org/peraturan-pemerintah-kebijakan-energi-nasional-penuh-solusi-palsu-dan-tidak-mendorong-transisi-energi-yang-adil-dan-berkelanjutan/>.

Ulya, Fika Nuru, dan Ihsanuddin. 2024. "Kenalkan Haji Isam ke Pengusaha Jepang, Prabowo: Pengusaha Terkemuka dari Kalimantan". Diakses melalui:

<https://nasional.kompas.com/read/2024/12/06/15204491/kenalkan-haji-isam-ke-pengusaha-jepang-prabowo-pengusaha-terkemuka-dari>.

Wahyudi, Nyoman Ari. 2022. "PLTU Cirebon-1 Bakal Disuntik Mati, Proyek Indika Energy (INDY) dan Marubeni CS". Diakses melalui: <https://market.bisnis.com/read/20221114/192/1597980/pltu-cirebon-1-bakal-disuntik-mati-proyek-indika-energy-indy-dan-marubeni-cs>.

Publikasi

Adaro Minerals. 2023. "*Laporan Tahunan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk: Downstreaming on Excellence, Upscaling on Strength*". Jakarta: PT Adaro Minerals Indonesia Tbk.

Bersihkan Indonesia. 2022. "*Nilai & Prinsip Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan di Indonesia*". Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Setiawan, Dody. 2025. "*Rencana Ekspansi PLTU Captive dapat Menghambat Target Iklim Indonesia*". Ember Energy.

Financial Action Task Force. 2013. "*Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)*".

- Indika Energy. 2024. *"Laporan Tahunan 2024: Navigating the Transition Strengthening Foundations"*. Jakarta: PT Indika Energy Tbk.
- Indradi, Yuyun, dkk. 2024. *"Penanggung Cuan Transisi Energi"*. Jakarta: Trend Asia
- International Energy Agency. 2024. *"Global Criticals Mineral Outlook 2024"*. France: IEA Publications.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. 2024. *"Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2023"*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- Mahaka X. 2024. *"Keterbukaan Informasi Kepada pemegang Saham Terkait dengan Transaksi Afiliasi PT Mahaka Media Tbk"*. Jakarta.
- Merdeka Copper Gold. 2023. *"Laporan Tahunan 2023: Transformative for Growth"*. Jakarta: PT Merdeka Copper Gold.
- _____. *"Merdeka Battery Minerals"*. Jakarta: PT Merdeka Copper Gold Tbk.
- TBS. 2023. *"Laporan Tahunan TBS 2023: Infinite Possibilities, Boundless Futures"*. Jakarta: PT TBS Energi Utama Tbk.

